



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah Perangkat Daerah yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

7. Rencana Strategis Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Tahun 2023.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Inspektorat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan Inspektorat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja Inspektorat Daerah disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja Inspektorat Daerah disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan RKA Inspektorat Daerah Tahun 2023; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2023.

Pasal 4

- (1) Renja Inspektorat Daerah berpedoman pada Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023.
- (2) Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Inspektorat Daerah tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Inspektorat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Inspektorat Daerah.
- (4) Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Inspektur Daerah menjaga kesesuaian antara Renja Inspektorat Daerah dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023.

Pasal 6

- (1) Renja Inspektorat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Tahun 2022;
 - c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
 - d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
 - e. BAB V Penutup.
- (2) Penjabaran Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Inspektur Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja Inspektorat Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja Inspektorat Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil Renja Inspektorat Daerah.
- (3) Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Inspektorat Daerah secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.
- (4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

- (1) Perubahan Renja Inspektorat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Inspektorat Daerah menerima surat

edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

(3) Penyusunan Perubahan Renja Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :

- a. perubahan RKPD Tahun 2023; dan
- b. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI PESISIR SELATAN,



Diundangkan di Painan
Pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2023

INSPEKTORAT



KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja (Renja) ini berisikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2023, dan akan menjadi pedoman bagi seluruh aparat Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan untuk Tahun 2023.

Kami menyadari masih banyaknya kekurangan dalam Rencana Kerja Tahunan ini, untuk itu sangat diharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Wabillahhi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Paman, 02 Agustus 2022
Inspektur,

RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19641112 199203 1 013

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah	22
2.3.1 Analisis Tingkat Kinerja	22
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan	23
2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	24
2.3.4 Tantangan dan Peluang	27
2.3.5 Formulasi Isu-Isu Strategis	28
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36

BAB III	TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH	
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	37
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah	37
3.3	Program dan Kegiatan	40
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	49
BAB V	PENUTUP	61

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 Kabupaten Pesisir Selatan	14
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	19
Tabel 2.3. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 Kabupaten Pesisir Selatan	30
Tabel 2.4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023	36
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023	39
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024	44
Tabel 4.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026	50
Tabel 4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Tahun 2023	56

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Hubungan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RPJPN dan SDGS	26
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renstra yang telah ditetapkan ditinjau kembali dengan disusunnya Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 pada Tahun 2021, untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah), penyesuaian untuk mengintegrasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perencanaan pembangunan. Dan perubahan aturan tentang

Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Rencana Kerja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di bidang pengawasan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Penyusunan Renja juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah ditingkat Provinsi dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan Perangkat Daerah, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun

berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.

Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu: Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun; Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah terdiri dari: Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah merupakan rencana untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah.

Proses penyusunan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- b. Penyusunan Renstra-PD dimaksud berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD, dan program kewilayahan.
- c. Pemda menyusun Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja PD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Renja Pemerintah.

- d. Renja PD merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- e. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas, pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemda maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- f. Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- h. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- i. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Untuk itu perumusan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 akan menyelaraskan tujuan dan sasaran pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan ditingkat perangkat daerah selaras dengan program pembangunan di tingkat pemerintah kabupaten dan program perangkat daerah ditingkat kabupaten dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilakukan dalam tahapan penyusunan Renja untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah Kabupaten terhadap sasaran perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan Kementerian Dalam Negeri ditingkat pusat.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 diantaranya adalah :

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 83 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Inspektorat Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

1.3 Maksud dan tujuan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
4. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Inspektorat Daerah tahun 2023 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Inspektorat Daerah, proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah, keterkaitan antara Renja Inspektorat Daerah dengan Dokumen RKPD, Renstra Inspektorat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan yang mengatur kewenangan Inspektorat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Inspektorat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi

program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Berisikan kajian terhadap kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah

Berisikan tentang sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah.

2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Khusus bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah

3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Inspektorat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kerja Renstra Inspektorat Daerah.

3.3 Program dan kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap bahan rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

BAB V Penutup

Bab ini berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian; kaidah-kaidah pelaksanaan; dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Inspektorat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 senilai Rp. 7.627.453.397,- (Tujuh milyar enam ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri dari 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan, realisasi anggaran senilai Rp. 7.220.766.169,- (Tujuh milyar dua ratus dua puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh sembilan rupiah). Untuk menilai kinerja capaian keuangan dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi "Sangat Tinggi" yaitu capaian berkisar antara > 90-100%, "Tinggi" yaitu capaian berkisar antara >75-90%, "Sedang" yaitu capaian berkisar antara >65-75%, "Rendah" yaitu capaian berkisar antara 50-65%, dan "Sangat Rendah" yaitu capaian di bawah 50%.

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja tahun 2021 terdapat 7 kegiatan yang dengan status capaian "Sangat Tinggi" (90,04%). Untuk capaian kinerja keluaran (output) kegiatan semuanya sudah tercapai sesuai perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dari berbagai indikator pada setiap sasaran yang

akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Tabel Rekapulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKT Inspektorat Daerah dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah sampai dengan Tahun berjalan, dengan Tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Tabel (T-C.29)

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NAMA PERANGKAT DAERAH : **INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021						Realisasi program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun berjalan		
											Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		Realisasi Renja Pengakat Daerah Tahun 2021		Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d tahun berjalan (Tahun 2022)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1						2	3	4		5	6		7		8=(7/6)	9	10=(8+9)		11=(10/4)	
6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				-										
6	01	01	2	02		<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>														
6	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59	Orang/ Bulan		56	Orang/ Bulan	56	Orang/ Bulan	100%	59	Orang/ Bulan	115	Orang/ Bulan	194.92
6	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	21	Dokumen		12	Dokumen	12	Dokumen	100%	15	Dokumen	27	Dokumen	128.57
6	01	01	2	05		<u>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</u>						-		-			-	-		
6	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	27	Orang		60	Orang	-	Orang	0%	2	Orang	2	Orang	7.41

6	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						-		-			-	-		
6	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket	100%	6	Paket	18 Paket	150.00
6	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket			12	Paket		Paket	0%	6	Paket	6 Paket	300.00
6	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket	100%	6	Paket	18 Paket	150.00
6	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket	100%	6	Paket	18 Paket	150.00
6	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Paket			12	Paket	12	Paket	100%	6	Paket	18 Paket	150.00
6	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan			12	Laporan	12	Laporan	100%	6	Laporan	18 Laporan	150.00
6	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan			12	Laporan	12	Laporan	100%	6	Laporan	18 Laporan	150.00
6	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						-		-			-	-		
6	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan			12	Laporan	12	Laporan	100%	6	Laporan	18 Laporan	150.00
6	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan			12	Laporan	12	Laporan	100%	6	Laporan	18 Laporan	150.00

6	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					-		-			-	-		
6	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit		12	Unit	12	Unit	100%	7	Unit	19 Unit	146.15
6	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	Unit		12	Unit	12	Unit	100%	15	Unit	27 Unit	135.00
6	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit		12	Unit	1	Unit	8%	1	Unit	2 Unit	200.00
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					-		-			-	-		
6	01	02	2	01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal					-		-			-	-		
6	01	02	2	01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10	Laporan		8	Laporan	4	Laporan	50%	4	Laporan	8 Laporan	80.00
6	01	02	2	01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	160	Laporan		152	Laporan	104	Laporan	68%	86	Laporan	190 Laporan	118.75
6	01	02	2	01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	8	Laporan		7	Laporan	4	Laporan	57%	3	Laporan	7 Laporan	87.50
6	01	02	2	01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5	Laporan		4	Laporan	1	Laporan	25%	1	Laporan	2 Laporan	40.00
6	01	02	2	01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	12	Dokumen		15	Dokumen	15	Dokumen	100%	21	Dokumen	36 Dokumen	300.00

6	01	02	2	02		<u>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</u>						-		-			-	-	-	
6	01	02	2	02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Laporan			Laporan	0	Laporan	0%	0	Laporan	-	Laporan	-
6	01	02	2	02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	117	Laporan		30	Laporan	9	Laporan	30%	104	Laporan	113	Laporan	96.58
6	01	03				<u>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</u>						-		-			-	-	-	
6	01	03	2	02		<u>Pendampingan dan Asistensi</u>						-		-			-	-	-	
6	01	03	2	02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41	Perangkat Daerah		3	Perangkat Daerah	0	Perangkat Daerah	0%	20	Perangkat Daerah	20	Perangkat Daerah	48.78

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Sehubungan belum adanya ketentuan tentang Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) untuk pelayanan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, maka cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dengan Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

Kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari capaian pelaksanaan tugas pokoknya yaitu penyelenggaraan pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance, clean goverment* dan pelayanan publik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk melihat hal tersebut, penilaian capaian kinerja difokuskan pada 2 program utama yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2022	
1	2	3	4	5	6	7				9	10	11	12	1
1	OPINI BPK			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		WTP	
			Jumlah Pengawasan Internal secara Berkala	160 obrik	170 obrik	177 obrik	184 obrik	194 obrik	215 obrik	121 obrik	100 obrik		125 obrik	
			Jumlah kasus pengaduan dilingkungan Pemerintahan Daerah	30 kasus	45 kasus	55 kasus	65 kasus	75 kasus	85 kasus	9 kasus	87 kasus		115 kasus	
			Jumlah temuan pengawasan yang telah terinventarisir	550 Temuan	750 Temuan	850 Temuan	1000 Temuan	1100 Temuan	1200 Temuan	438 Temuan	593 Temuan		600 temuan	
			Jumlah LKPD yang dievaluasi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	
			Jumlah Hasil Temuan Pengawasan yang telah ditindak lanjuti	550 Temuan	750 Temuan	850 Temuan	1000 Temuan	1100 Temuan	1200 Temuan	329 Temuan	317 Temuan		600 Temuan	
2	Nilai Rata-Rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten		Jumlah APIP yang mengikuti Diklat	- orang	27 orang	40 orang	50 orang	60 orang	70 orang	5 orang	2 orang		5 orang	
			Jumlah APIP yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri	12 Angkatan	12 Angkatan	12 Angkatan	12 Angkatan	12 Angkatan	12 Angkatan	12 Angkatan	7 Angkatan		2 Angkatan	

			Jumlah RKA Awal dan Perubahan yang di evaluasi	45 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	45 OPD	41 OPD		41 OPD	
			Jumlah RPJMD yang direviu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	
			Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), PPRG dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang direview	45 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD		41 OPD	
			Jumlah LKj, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja dan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah PD yang dievaluasi	45 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	45 OPD	41 OPD		41 OPD	
3	Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Jumlah LKj PD yang dievaluasi	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	
4	Level Maturitas		Jumlah PD yang mengimplemtasikan SPIP	45 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD	45 OPD	41 OPD		41 OPD	

Berdasarkan data Hasil Evaluasi RKPD Tahun 2021, realisasi capaian kinerja jumlah pengawasan tahunan pada tahun 2021 sejumlah 160 obrik target dan terealisasi 121 obrik atau tercapai 75,63 %. Untuk persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada tahun 2021 yaitu tindak lanjut hasil temuan BPK tercapai 79,64 % dari target 90 % atau realisasinya 88,50% dan untuk tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Daerah tercapai 59,82 % dari target 80 % atau realisasinya 85%. Untuk Opini Laporan Keuangan WTP dari BPK pada Tahun 2021 tercapai dengan prestasi predikat opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020/21 dikeluarkan BPK pada awal tahun 2022. Kinerja yang rendah pencapaiannya adalah penyelesaian tindak lanjut temuan pengawasan. Persentase PD yang mendapat Rata-rata nilai SAKIP Perangkat Daerah tahun 2021 dengan nilai B dengan target B, Nilai Rata-Rata Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dengan nilai CC dengan target CC dan Level Maturitas SPIP Pemda telah mencapai target dengan capaian kinerja level 3. Untuk kinerja yang belum tercapai perlu menjadi perhatian khusus dalam peningkatan kinerja pelayanan ke depan. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal di daerah dapat melakukan penilaian terhadap pencapaian penyelenggaraan pemerintahan yang optimal dan bermanfaat berdasarkan hasil pengawasan sekaligus sebagai tolak ukur Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian kinerja seperti terlihat pada tabel 2.2 tersebut.

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Analisis tingkat kinerja

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan pada Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan telah menyusun program kerja dan kegiatan dalam Rencana Strategis yang memuat tugas pokok dan fungsi serta upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mendukung pencapaian Misi ***“Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan”***

Dalam pencapaian tujuan ***“Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja”***. Indikator yang sudah tercapai yaitu opini WTP atas LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021, Nilai Rata-Rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten mencapai nilai CC, Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah baru mencapai nilai BB dan level Maturitas SPIP mencapai level 3. Tantangan untuk Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2023 adalah mempertahankan capaian opini WTP atas LKPD dan Maturitas SPIP serta meningkatkan rata-rata nilai SAKIP dan Nilai Rata-Rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan secara kelembagaan dapat dinilai dari tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Kapabilitas APIP merupakan penilaian kemampuan APIP

berdasarkan kriteria *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang mengelompokan Kapabilitas APIP ke dalam level yaitu level 1 (*Initial*), level 2 (*Infrastructure*), level 3 (*Integrated*), level 4 (*Managed*) dan level 5 (*Optimizing*) sesuai dengan target RPJMN 2015-2021. Kapabilitas APIP pada akhir tahun 2019 telah mencapai level 3 penuh. Untuk itu Inspektorat Daerah selaku APIP Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan upaya-upaya mempertahankan Kapabilitas dengan berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP Tahun 2015-2021 dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP. Hasil yang telah dicapai pada Tahun 2019, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan telah berada pada level 3 berdasarkan Surat Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor SP-21/03/02/2018 tanggal 9 Januari 2019 perihal Hasil Penjaminan Kualitas (*Quality Assurance*) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019. Diupayakan dapat mempertahankan level Kapabilitas APIP ke level 3 tahun 2023.

2.3.2 Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal,

kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan yang dihadapi pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Masih belum seimbang jumlah personil dengan jumlah objek pemeriksaan baik pemeriksaan regular maupun pemeriksaan kasus/khusus.
2. Masih rendahnya kesadaran objek pemeriksaan dalam menjalankan rekomendasi pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP).
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan informasi adanya penyimpangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2.3.3 Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pengawasan Intern Pemerintah yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan *sebagai* salah satu fungsi manajemen organisasi pemerintahan memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja pencapaian tujuan pemerintah dan mencegah tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam mencapai kinerja terbaik.

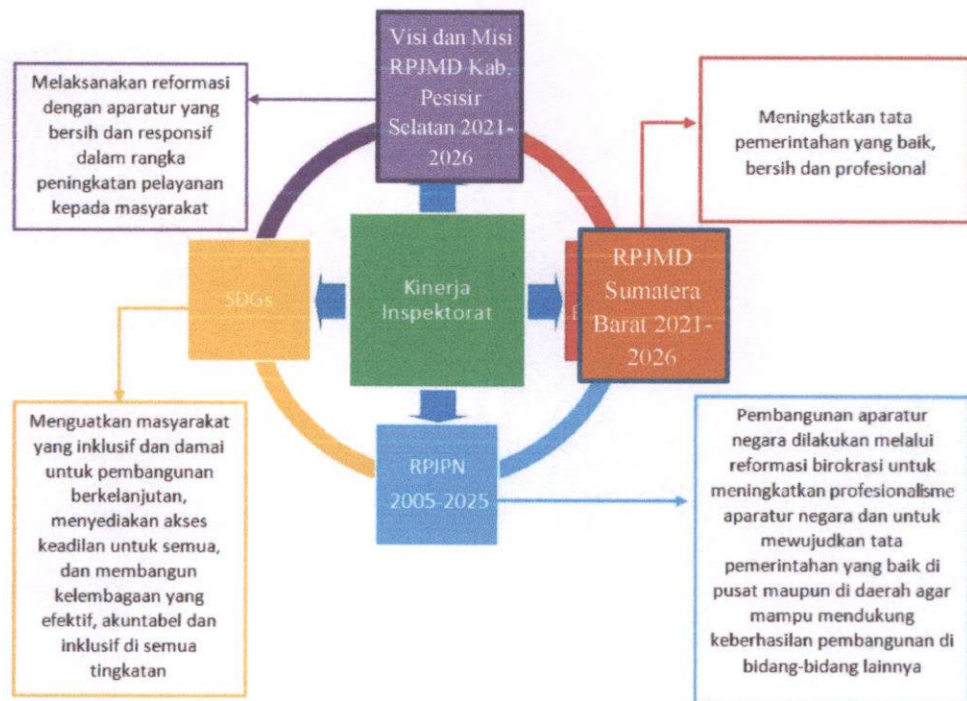
Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku APIP akan berdampak langsung pada kinerja reformasi birokrasi dan upaya pembangunan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Terkait dengan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdampak pada pencapaian

Misi memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan. Terkait dengan pencapaian Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJMN) Tahun 2005-2025, kinerja Inspektorat Daerah berdampak pada pencapaian agenda nasional “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Transparan”. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan” dan agenda “Memperkuat Kehadiran Negara Dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya”. Terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) kinerja Inspektorat Daerah berdampak pada pencapaian tujuan 16, yaitu “Memperjuangkan masyarakat yang damai dan inklusi, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun intitusi-institusi yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif pada semua tingkat dan sasaran secara substansial mengurangi segala bentuk korupsi dan penyuapan secara substansial.

Hubungan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dengan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan, RPJMD Provinsi Sumatera Barat, RPJPN dan SDGs dapat dilihat pada Gambar 2.1. berikut ini :

Gambar 2.1

Hubungan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
dengan RPJMD Kabupaten, RPJMD Provinsi Sumatera Barat,
RPJPN
dan SDGs



2.3.4 Tantangan dan Peluang

Dalam pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan menghadapi beberapa tantangan dan peluang. Tantangan pengembangan dan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Sering terjadi perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap peran Inspektorat Daerah dalam pembangunan yang akuntabel, efektif, efisien dan transparan.
3. Rendahnya pemahaman dan animo PD/auditan dalam melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
4. Belum terpadunya Sistem Pengawasan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan.
5. Lemahnya sinergitas program dan kegiatan pengawasan dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat Daerah dalam pengawasan pemerintahan daerah.
2. Adanya dukungan yang kuat dari Kepala Daerah terhadap keberadaan Inspektorat Daerah.
3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung Inspektorat Daerah.
4. Tingginya animo dan apresiasi para pemangku kepentingan terhadap Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintahan Daerah.

5. Tingginya dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah terhadap pengawasan.

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Strategis

Dalam upaya melakukan misi memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pencapaian sasaran meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah dan meningkatnya Maturitas SPIP, maka perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta menyusun program prioritas Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Berdasarkan telaahan identifikasi permasalahan, maka perumusan isu-isu strategis adalah :

1. Kurangnya kompetensi aparatur pengawasan.
2. Masih rendahnya implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di masing-masing unit kerja.
3. Masih rendahnya pemanfaatan hasil-hasil pemeriksaan aparat pengawasan internal oleh Perangkat Daerah dalam rangka pengambilan kebijakan.

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Dibandingkan dengan rancangan RKPD 2022, maka Rencana Kerja Tahun 2023 relatif tidak ada perbedaan mendasar dalam susunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Perbandingan antara Rancangan RKPD dengan Rencana Kerja menjadi penting mengingat RKPD selanjutnya menjadi patokan dalam penyusunan KUA PPAS dan RAPBD Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan demikian amat penting untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah dengan patokan program dan kegiatan yang tercantum dalam

RKPD tahun yang sama demi kemudahan administrasi, sinkronisasi dan keselarasan antar Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Analisis kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tertuang dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2022. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023 Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini :

tabel 2.3
Tabel (T-C.31)
REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NAMA PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	INSPEKTORAT DAERAH				8,300,596,293					8,300,596,293	
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,030,596,293	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7,131,607,650	
A.	<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>				31,000,000	<u>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</u>				23,692,226	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	30,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	23,692,226	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	1,000,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	-	
B.	<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>				6,295,596,293	<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>				6,392,841,246	

3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59	Orang/Bulan	6,200,596,293	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59	Orang/ Bulan	6,306,596,967	
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	95,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	86,244,279	
C.	<u>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</u>					50,000,000	<u>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</u>					50,000,000	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5	orang	50,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	Orang	50,000,000	
D.	<u>Administrasi Umum Perangkat Daerah</u>					259,400,000	<u>Administrasi Umum Perangkat Daerah</u>					254,544,286	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	8,200,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	5,374,398	
7	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	17,500,000	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	Paket	12,543,000	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	40,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	34,025,274	
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	17,300,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	17,240,964	

10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	5,400,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	5,400,000	
11	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	21,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	20,020,000	
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	150,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	159,940,650	
E.	<u>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>					3,000,000	<u>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>					18,521,460	
13	Pengadaan Mebel	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5	Unit	1,000,000	Pengadaan Mebel	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	Unit	-	
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	1,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	Unit	18,521,460	
15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	Unit	1,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-	
F.	<u>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>					157,000,000	<u>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>					139,324,782	
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	42,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	41,470,500	

17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	115,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	97,854,282	
G.	<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>					234,600,000	<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>					252,683,650	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit	158,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit	176,083,650	
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	Unit	16,600,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	Unit	16,600,000	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	60,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	60,000,000	
II.	<u>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</u>		-	-		1,230,000,000	<u>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</u>		-			1,109,322,593	
H.	<u>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</u>		-	-		977,000,000	<u>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</u>		-			845,653,277	
21	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4	Laporan	65,000,000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4	Laporan	72,276,961	
22	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	96	Laporan	558,000,000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	96	Laporan	450,815,089	

23	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3	Laporan	48,000,000	Reviu Laporan Kinerja	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3	Laporan	42,596,370	
24	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3	Laporan	18,000,000	Reviu Laporan Keuangan	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	5	Laporan	38,018,410	
25	Pengawasan Desa	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	15	Laporan	1,000,000	Pengawasan Desa	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		Laporan	-	
26	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	Kesepakatan	1,000,000	Kerja Sama Pengawasan Internal	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		Kesepakatan	-	
27	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24	Dokumen	286,000,000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24	Dokumen	241,946,447	
I.	<u>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</u>					253,000,000	<u>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</u>					263,669,316	
28	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Laporan	50,000,000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Laporan	47,956,714	
29	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	35	Laporan	203,000,000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	45	Laporan	215,712,602	
III.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		-	-		40,000,000	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		-			59,666,050	

J.	<u>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</u>					2,000,000	<u>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</u>					-	
30	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	2	Rekomendasi	1,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	0	Rekomendasi	-	
31	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2	Rekomendasi	1,000,000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	0	Rekomendasi	-	
K.	<u>Pendampingan dan Asistensi</u>					38,000,000	<u>Pendampingan dan Asistensi</u>					59,666,050	
32	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41	PD	35,000,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41	Perangkat Daerah	42,529,550	
33	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41	PD	1,000,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	41	Perangkat Daerah	17,136,500	
34	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	41	PD	1,000,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	41	Perangkat Daerah	-	
35	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	41	PD	1,000,000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	41	Perangkat Daerah	-	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, khusus untuk bidang pengawasan, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4
(Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan
Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

TIDAK ADA USULAN

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah mendukung Arah Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 terkait Reformasi Hukum dan Birokrasi yang berhubungan dengan “Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya”.

Kebijakan Nasional terkait bidang pengawasan juga dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib mencantumkan program pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Dokumen perencanaan dan penganggaran.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah

Tujuan dan sasaran dalam Renja adalah turunan penjabaran tujuan Renstra yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Perumusan tujuan menjabarkan apa yang harus dicapai dan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan yang akan membantu mempermudah penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Pesisir Selatan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik dan terukur sesuai dengan tujuan organisasi.

Tujuan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN, Akuntabel dan Berkinerja.

Pada Tahun 2023 yang akan datang sasaran pengawasan yang akan dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berupaya meningkatkan kinerjanya berdasarkan program dan kegiatan serta rencana kinerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur dan berkelanjutan. Sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan indikator kinerja :
 - a. Opini BPK.
 - b. Nilai Rata-Rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten
 - c. Rata-Rata Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya Maturitas SPIP dengan indikator kinerja :
 - a. Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah.
 - b. Level Kapabilitas APIP

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023. Tujuan, Sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dari KKN, Akuntabel dan Berkinerja	1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Pemerintahan Daerah	1. Opini BPK	WTP
			2. Nilai Rata-Rata Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten	B
			3. Rata-rata nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Intern Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah	BB
		2. Meningkatnya Maturitas SPIP	– Level Maturitas SPIP – Level Kapabilitas APIP	3

3.3 Program dan Kegiatan

a. Faktor-faktor yang menjadi Bahan Pertimbangan terhadap Rumusan Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 disusun dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dalam Misi “Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan transparan”
2. Mendukung percepatan *Sustainable Development Goals* (SDGs) kinerja pada tujuan 16 yaitu menguatkan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.
3. Melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Perumusan isu strategis dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan.

Dalam Renja ini Inspektorat Daerah melaksanakan 3 program, 11 kegiatan dan 35 sub kegiatan dengan jumlah total dana Pagu indikatif sebesar Rp 8.300.596.293,- dari Dana Alokasi Umum (DAU). Lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan kecuali untuk kegiatan rapat koordinasi serta pendidikan dan pelatihan yang dilakukan di luar daerah.

Program kerja dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan disusunlah Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman serta arahan aktivitas tahunan sebagai penjabaran kegiatan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari rencana strategik dalam mencapai tujuan yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Program dan Kegiatan tersebut yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 4) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Bangunan Kantor
 - 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 8) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 9) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 10) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- 11) Fasilitas Kunjungan Tamu
- 12) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 13) Pengadaan Mebel
 - 14) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 15) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 16) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 17) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 18) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 19) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 20) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- h. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 21) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 22) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 23) Reviu Laporan Kinerja
 - 24) Reviu Laporan Keuangan
 - 25) Pengawasan Desa
 - 26) Kerjasama Pengawasan Internal

27) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP

i. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan
Tertentu

28) Penanganan Penyelesaian Kerugian
Negara/Daerah

29) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

j. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
dan Fasilitasi Pengawasan

30) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang
Pengawasan

31) Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Fasilitasi
Pengawasan

k. Pendampingan dan Asistensi

32) Pendampingan dan Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah

33) Pendampingan Asistensi, Verifikasi, dan
Penilaian Reformasi Birokrasi

34) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Serta
Verifikasi Pencegahan Dan Pemberantasan
Korupsi

35) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi
Penegakan Integritas

Masing-masing Program dan Kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 3.2 dibawah ini :

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023
DAN PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2024		
							Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAH												
6	01					INSPEKTORAT DAERAH							8,300,596,293	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum				11,474,414,425
6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten			100%			7,030,596,293			Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	100%	8,075,299,385
6	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah			12 bulan	31,000,000					85,000,000
6	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		3	Laporan		30,000,000					50,000,000
6	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		3	Laporan		1,000,000					35,000,000
6	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Tersedianya Administrasi Keuangan perangkat daerah			12 bulan	6,295,596,293					6,658,474,485
6	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		59	Orang/Bulan		6,200,596,293					6,521,328,130
6	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12	Dokumen		95,000,000					137,146,355

6	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		12 bulan	<u>50,000,000</u>				<u>140,000,000</u>
6	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 orang		50,000,000				140,000,000
6	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		12 bulan	<u>259,400,000</u>				<u>358,053,520</u>
6	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket		8,200,000				10,288,500
6	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket		17,500,000				40,000,000
6	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket		40,000,000				50,537,530
6	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket		17,300,000				40,342,490
6	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12 Dokumen		5,400,000				6,000,000
6	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan		21,000,000				55,000,000
6	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan		150,000,000				155,885,000
6	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah		12 bulan	<u>3,000,000</u>				<u>160,000,000</u>
6	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 Unit		1,000,000				60,000,000
6	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		1 Unit		1,000,000				50,000,000

6	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	Unit		1,000,000				50,000,000	
6	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah			12 bulan	157,000,000				208,160,680	
6	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	Laporan		42,000,000				42,298,500	
6	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	Laporan		113,000,000				165,862,180	
6	01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah			12 bulan	234,600,000				465,610,700	
6	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		13	Unit		158,000,000				300,179,600	
6	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		31	Unit		16,600,000				56,600,000	
6	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	Unit		60,000,000				108,831,100	
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah Temuan BPK, Nilai SAKIP, Opini BPK, Persentase Tindak lanjut Temuan	100 Temuan, Nilai SAKIP: A, WTP, persentase TL : 14 %				1,230,000,000			Jumlah Temuan BPK, Nilai SAKIP, Opini BPK, Persentase Tindak lanjut Temuan	100 Temuan, Nilai SAKIP: A, WTP, persentase TL : 14 %	3,049,115,040
6	01	02	2	01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Terlaksananya pengawasan internal pemerintah daerah			12 Bulan	977,000,000				2,415,578,160	
6	01	02	2	01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah		4	Laporan		65,000,000				80,000,000	

6	01	02	2	01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah		96	Laporan		558,000,000				1,199,428,680
6	01	02	2	01	03	Reviu Laporan Kinerja		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja		3	Laporan		48,000,000				250,247,440
6	01	02	2	01	04	Reviu Laporan Keuangan		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan		9	Laporan		18,000,000				130,123,720
6	01	02	2	01	05	Pengawasan Desa		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa		1	Laporan		1,000,000				50,000,000
6	01	02	2	01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal		Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk		1	Kesepakatan		1,000,000				25,000,000
6	01	02	2	01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP		24	Dokumen		286,000,000				680,778,320
6	01	02	2	02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Terlaksananya kegiatan pengawasan tujuan tertentu			12 Bulan	<u>253,000,000</u>				<u>633,536,880</u>
6	01	02	2	02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani		1	Laporan		50,000,000				75,984,200
6	01	02	2	02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		35	Laporan		203,000,000				557,552,680
6	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level kapabilitas APIP, Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah		PK APIP : Level 3, SPIP: Level 3				40,000,000		Level kapabilitas APIP, Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	PK APIP : Level 3, SPIP: Level 3	350,000,000
6	01	03	2	01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			Terlaksananya perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan			12 Bulan	<u>2,000,000</u>				<u>60,000,000</u>
6	01	03	2	01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		1	Rekomendasi		1,000,000				30,000,000
6	01	03	2	01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun		1	Rekomendasi		1,000,000				30,000,000

6	01	03	2	02		Pendampingan dan Asistensi			Terselenggaranya pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah			12 Bulan	38,000,000					290,000,000
6	01	03	2	02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		41	Perangkat daerah		35,000,000					80,000,000
6	01	03	2	02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		10	Perangkat daerah		1,000,000					75,000,000
6	01	03	2	02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		1	Kegiatan		1,000,000					90,000,000
6	01	03	2	02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		5	Perangkat daerah		1,000,000					45,000,000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Perumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra serta Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan adalah :

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Indikator Kinerja dari kedua program tersebut menjadi tanggung jawab Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam evaluasi RKPD dan LKj.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

TAHUN 2021 - 2026

[illegible]

				2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 bulan	12 bulan	105	12 bulan	175	12 bulan	245	12 bulan	305	12 bulan	375	12 bulan	445		
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																
				1. Penyediaan Paksi Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Paksi Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	0	58 unit	29	60 unit	30	65 unit	33	70 unit	35	80 unit	40		
				2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Update data dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	0	3 data	25	5 data	40	10 data	75	13 data	100	15 data	125		
				3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah APF yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	0	27 orang	500	40 orang	750	50 orang	1000	60 orang	1100	70 orang	1200		
				Administrasi Umum Perangkat Daerah																
				1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan Komponen Instalasi Alat Listrik	12 bulan	12 bulan	8	12 bulan	15	12 bulan	22	12 bulan	30	12 bulan	37	12 bulan	45		
				2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	0	12 bulan	15	12 bulan	20	12 bulan	30	12 bulan	40	12 bulan	50		
				3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan Bahan Alat Tulis Kantor	12 bulan	12 bulan	40	12 bulan	75	12 bulan	100	12 bulan	125	12 bulan	150	12 bulan	175		
				4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaan Administrasi	12 bulan	12 bulan	17	12 bulan	35	12 bulan	50	12 bulan	65	12 bulan	80	12 bulan	100		
				5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	5	12 bulan	5.4	12 bulan	6	12 bulan	6.5	12 bulan	7	12 bulan	7.5		
				6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Ketersediaan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 bulan	12 bulan	34	12 bulan	35	12 bulan	37	12 bulan	39	12 bulan	42	12 bulan	45		
				7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan Operasional Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	12 bulan	115	12 bulan	350	12 bulan	450	12 bulan	550	12 bulan	650	12 bulan	750		
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
				1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2 (dua), Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 (empat)	-	-	0	2 unit	510	1 unit	250	2 unit	550	1 unit	250	1 unit	250		
				2. Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel (Meja, Kursi)	-	-	0	1 paket	80	1 paket	85	1 paket	90	1 paket	95	1 paket	100		
				3. Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya (Proyektor + Attachment, AC, Penghancur Kertas, Laptop dan Meja Rimpel)	-	-	0	1 paket	135	1 paket	140	1 paket	150	1 paket	155	1 paket	160		

				4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya	Terbangunnya Toilet	-	-	0	1 unit	125	-	0	1 unit	125	1 unit	125	1 unit	125		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	44.36	12 bulan	80	12 bulan	100	12 bulan	120	12 bulan	140	12 bulan	150		
				2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	59.51	12 bulan	75	12 bulan	100	12 bulan	125	12 bulan	150	12 bulan	175		
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
				1 Penyediaan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan	12 bulan	12 bulan	0	12 bulan	105	12 bulan	110	12 bulan	120	12 bulan	130	12 bulan	140		
				2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional	12 bulan	12 bulan	192.73	12 bulan	145	12 bulan	175	12 bulan	200	12 bulan	225	12 bulan	250		
				3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	12 bulan	8.55	12 bulan	60	12 bulan	75	12 bulan	90	12 bulan	100	12 bulan	110		
				4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 tahun	1 tahun	30.39	1 tahun	35	1 tahun	45	1 tahun	60	1 tahun	70	1 tahun	80		
				5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana (Renovasi Garasi, Laundry Oorden dan Sikat Ruangan)	-	-	0	3 paket	50	3 paket	50	3 paket	50	3 paket	50	3 paket	50		
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi																
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan																
				1 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terumuskannya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	-	-	0	2 perbup	25	2 perbup	25	2 perbup	25	2 perbup	25	2 perbup	25		
				2 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Terumuskannya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	-	-	0	2 peraturan	25	2 peraturan	25	2 peraturan	25	2 peraturan	25	2 peraturan	25		

				Pendampingan dan Asistensi															
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (Pelaksanaan SPIP, LHKPN dan LHKASN, Seber Pungli)	-	-	0	4 kegiatan	200	4 kegiatan	200	4 kegiatan	200	4 kegiatan	200	4 kegiatan	200	
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	-	0	63 nilai	75	70 nilai	80	75 nilai	85	80 nilai	90	85 nilai	100	
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD KPK)	-	-	0	1 kegiatan	80	1 kegiatan	80	1 kegiatan	80	1 kegiatan	80	1 kegiatan	80	
				Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	-	0	1 kegiatan	40	1 kegiatan	40	1 kegiatan	40	1 kegiatan	40	1 kegiatan	40	

Dalam Renja Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 terdapat 3 Program, 11 Kegiatan dan 35 sub kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung Visi dan Misi Daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah disinkronkan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap programnya. Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Tahun 2023 dapat dilihat pada table 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2
Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat Daerah Tahun 2023

Kode						Program/Kegiatan/sub-kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Target Kinerja program dan Kerangka Pendanaan			
								Target	Rupiah	Lokasi	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
6	01					INSPEKTORAT DAERAH			8,300,596,293		
6	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	100	%	7,030,596,293	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2	Bulan	31,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	30,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	1,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	02		<u>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</u>	Tersedianya Administrasi Keuangan perangkat daerah	12	Bulan	<u>6,295,596,293</u>	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	826	Orang/Bulan	6,200,596,293	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	95,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12	Bulan	<u>50,000,000</u>	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	5	orang	50,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan

							Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				
6	01	01	2	06		<u>Administrasi Umum Perangkat Daerah</u>	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	<u>259,400,000</u>	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	8,200,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	17,500,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	40,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	17,300,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12	Dokumen	5,400,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	21,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	150,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	07		<u>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</u>	Terlaksananya pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	12	Bulan	<u>3,000,000</u>	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Unit	1,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	1,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan

6	01	01	2	08		<u>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	12	Bulan	157,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	42,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	115,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	09		<u>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</u>	Terlaksananya pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	12	Bulan	234,600,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13	Unit	158,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	Unit	16,600,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	60,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah Temuan BPK, Nilai SAKIP, Opini BPK, Persentase Tindak lanjut Temuan	100 Temuan, Nilai SAKIP: A, WTP, persentase TL : 14 %		1,230,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	02	2	01		<u>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</u>	Terlaksananya pengawasan internal pemerintah daerah	12	Bulan	977,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	02	2	01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	4	Laporan	65,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	02	2	01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	96	Laporan	558,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	02	2	01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	3	Laporan	48,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan

6	01	02	2	01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	9	Laporan	18,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	02	2	01	05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	1	Laporan	1,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	02	2	01	06	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	Kesepakatan	1,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	02	2	01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24	Dokumen	286,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	02	2	02		<u>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</u>	Terlaksananya kegiatan pengawasan tujuan tertentu	12	Bulan	<u>253,000,000</u>	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	02	2	02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1	Laporan	50,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	02	2	02	02	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	35	Laporan	203,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	03				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level kapabilitas APIP, Level Maturitas SPIP Pemerintah Daerah	PK APIP : Level 3, SPIP: Level 3		40,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	03	2	01		<u>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</u>	Terlaksananya perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	12	Bulan	<u>2,000,000</u>	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	03	2	01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	1,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	03	2	01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	1,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	03	2	02		<u>Pendampingan dan Asistensi</u>	Terselenggaranya pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah	12	Bulan	<u>38,000,000</u>	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan

6	01	03	2	02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	41	Perangkat daerah	35,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	03	2	02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10	Perangkat daerah	1,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	03	2	02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1	Kegiatan	1,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan
6	01	03	2	02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	5	Perangkat daerah	1,000,000	Kab. Pesisir Selatan. IV Jurai, Painan

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 merupakan dokumen yang berisi identifikasi permasalahan, isu strategis, tujuan dan sasaran, serta program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun yang bersifat indikatif merupakan pedoman Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2023. Karena Renja ini masih bersifat indikatif, maka jika terjadi kekurangan anggaran, maka harus dilakukan penyesuaian rencana dengan mengurangi kegiatan dengan skala prioritas lebih rendah atau dengan mengurangi target capaian. Jika ternyata dana yang tersedia melebihi, maka penyesuaian dilakukan dengan perubahan target kinerja dan penambahan kegiatan untuk mendukung sarana dan prasana kerja.

Renja ini sudah menyelaraskan target dan indikator kinerja yang telah tertuang dalam Revisi Renstra dengan menyesuaikan bentuk dan susunan perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi dan perspektif Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan baik pada tingkatan pemerintah daerah maupun perangkat daerah. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentu tidak dapat melakukan sendiri. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perlu di dukung oleh seluruh pemangku peran terkait, baik pimpinan dan staf serta seluruh perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, mitra auditan, mitra sejawat APIP, Aparat Penegak Hukum, serta tak kalah penting adalah komponen masyarakat.

Besar harapan kami agar dokumen Renja ini juga dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi pemangku peran terkait

dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan pemerintahan menuju terwujudnya birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat melalui reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja di masa yang akan datang.

BUPATI PESISIR SELATAN,

The official stamp of the Bupati Pesisir Selatan is a circular emblem. It features a central Garuda Pancasila, the national symbol of Indonesia, with the motto 'KATA MUKTI' (Word is Freedom) inscribed on a banner below it. The outer ring of the stamp contains the text 'BUPATI' at the top and 'PESISIR SELATAN' at the bottom, separated by two small stars.

RUSMA YUL ANWAR